

BAB V

MODEL PENGEMBANGAN

A. Rasional

Sebagai sebuah negara dengan populasi penduduk terbesar ke-5 di dunia, hingga saat ini Negara Indonesia tengah mengalami dua tantangan besar yaitu otonomi daerah dan era globalisasi total yang ditandai dengan munculnya perdagangan bebas, dimana barang, jasa dan investasi bebas keluar masuk negara tanpa mengenal batas negara (*borderless*). Implikasi dari kondisi tersebut memaksa Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas produk barang dan jasa serta tenaga kerja yang dimiliki agar mampu berkompetisi di era global dan memiliki keunggulan kompetitif (*competitif advantage*), karena jika tidak siap dengan kondisi tersebut maka Indonesia akan tergerus dan menjadi pemakai produk dan tenaga kerja asing yang lebih kompetitif.

Dalam kerangka mempersiapkan dan meningkatkan keunggulan kompetitif (*competitif advantage*) tersebut sumber daya manusia menjadi “kekuatan utama” bagi industri nasional dalam menghasilkan keunggulan dalam konteks yang lebih komprehensif, dan inovatif. Salah satu sektor yang paling menentukan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif tersebut adalah pendidikan merupakan sebagai sektor paling strategis dalam pembangunan nasional, melalui pendidikan diharapkan selain dapat diberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat.

Pendidikan yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah pendidikan kejuruan yang berorientasi pada dunia industri dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran dan didukung oleh kurikulum yang sesuai. Oleh karenanya sekolah kejuruan dalam proses pembelajaran harus bisa membuat pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri, dalam

menghasilkan sumberdaya manusia profesional yang dapat diandalkan dan unggul menghadapi persaingan global.

Sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dipercaya dapat memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional untuk mempersiapkan anak didik memasuki pekerjaan melalui kegiatan proses belajar mengajar berupa materi *course competency* dan pengalaman kerja dalam mengembangkan *core competency*. Proses pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK) memiliki karakter yang berbeda dengan pendidikan umum, ditinjau dari kriteria pendidikan, substansi pelajaran dan outputnya, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan model sekolah (sekolah kejuruan), model magang (*apprenticeship*) dan model pendidikan dan pelatihan kerja (*job training*). Pendidikan kejuruan akan efektif dan efisien apabila lingkungan belajar merupakan replika lingkungan kerja yang akan ditempati oleh lulusan nantinya.

Pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan yang dituntut untuk selalu dinamis dalam melakukan perubahan dan beradaptasi terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertumbuhan pasar kerja. Salah satu tantangan nyata pendidikan kejuruan adalah semakin meningkatnya jumlah lulusan lembaga pendidikan yang tidak berbanding lurus dengan jumlah peluang kerja yang tersedia, menyebabkan banyak yang tidak dapat terserap oleh dunia kerja sehingga meningkatkan jumlah penangguran. Oleh karenanya perlu diupayakan perubahan pola paradigma lulusan SMK sebagai *job seeker* menjadi *job creator* untuk bekerja mandiri dan mempekerjakan orang lain sebagai wirausahawan.

Masalah yang sering muncul dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan dalam melakukan perubahan dan beradaptasi terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertumbuhan pasar kerja adalah keterbatasan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh pendidikan kejuruan yang masih jauh ketinggalan dengan kondisi di industri.

Disinilah pentingnya sebuah kerjasama dan kolaborasi antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan industri dalam mengembangkan program mencapai tujuan bersama.

Bagi pendidikan kejuruan kerjasama yang dibangun dengan dunia industri merupakan suatu hal yang sangat tepat khususnya dalam mengembangkan *resources*. Oleh karenanya sekolah menengah kejuruan diharapkan mampu memberdayakan (*empowering*) semua potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungannya. Dengan adanya kerjasama antara pendidikan kejuruan dan industri diharapkan terdapat pemanfaatan fasilitas yang dapat memberi manfaat yang cukup besar bagi kedua belah pihak khususnya sebagai *tools improvement*. Dunia industri sebagai mitra harus dapat berjalan seiring dan berkembang bersama dunia pendidikan kejuruan. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya selain meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional lulusan SMK, bentuk tantangan lainnya adalah menumbuhkan jiwa wiraswasta (*self-employment*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang diharapkan mampu menjadi *job creator* dan menciptakan lapangan baru serta membantu lainnya dalam memperoleh kesempatan kerja.

Kerjasama kemitraan adalah sebuah inovasi proses pendidikan kejuruan sebagai bentuk responsif dari manajemen pendidikan kejuruan dalam memberdayakan (*empowering*) semua potensi dan berbagi *resources* yang dimiliki untuk mencapai tujuan pendidikan .

B. Model Pengembangan Manajemen Strategik Kerjasama Kemitraan SMK – DUDI dalam Peningkatan Mutu SMK

Model merupakan sebuah pola (acuan, contoh, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dikembangkan yang mewakili atau menggambarkan sesuatu yang dicontoh. Gambaran yang dikembangkan dalam model merupakan abstraksi dari sistem sebenarnya. Apa yang digambarkan dalam model biasanya lebih sederhana, namun memiliki tingkat prosesntase yang bersifat menyeluruh yang memusatkan perhatian pada beberapa sifat saja.

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa model merupakan pengganti dari suatu benda atau sistem yang sebenarnya, yang dapat diarahkan untuk kepentingan suatu eksperimen (Forrester, 1973).

Pengembangan suatu model yang digunakan tergantung pada fenomena (sistem) yang dihadapi, sehingga kredibilitas model tergantung pada efektifitas model tersebut. Keberhasilan sebuah model dapat diukur dan ditentukan oleh komponen-komponen : (1) akurat, jika penyelesaian model dapat menggambarkan fenomena dengan akurat sehingga cocok dan sesuai dengan fenomena tersebut; (2) realistik, jika asumsi-asumsi yang digunakan benar; (3) tepat, jika prediksinya menggunakan bilangan atau istilah matematika; (4) awet, jika model tidak terpengaruh oleh galat dalam input data; (5) general, jika model dapat digunakan dalam berbagai situasi yang lebih luas; (6) berguna, jika konklusi bermanfaat dan dapat digunakan untuk menghasilkan model yang baik.

Dalam pengembangan model Manajemen Strategik Kerjasama Kemitraan SMK – DUDI dalam Peningkatan Mutu SMK, dikembangkan dengan tujuan untuk studi tingkah laku sistem (*system behaviour*) melalui analisis rinci terhadap komponen atau unsur dan proses utama yang menyusun sistem dan interaksinya antara satu dengan lainnya. Pengembangan model ini berperan amat penting dalam pengembangan teori sebagai konsep dasar yang menata rangkaian aturan yang digunakan untuk menggambarkan sistem, sebagaimana disampaikan oleh Jones (1987) bahwa dua sasaran pokok dari sebuah modeling adalah memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai hubungan sebab-akibat (*cause-effect*) dalam suatu sistem, dan menyediakan interpretasi kualitatif dan kuantitatif yang lebih baik akan sistem tersebut.

Pengembangan Model Manajemen Strategik Kerjasama Kemitraan SMK – DUDI dalam Peningkatan Mutu SMK merupakan sebuah konsep sebagai tahap pengembangan dari sistem yang disederhanakan. Sehingga model yang diajukan merupakan pengganti (*substitusi*) sistem yang dipertimbangkan. Sistem yang dimaksud dalam pengembangan

model ini adalah Sistem Manajemen Strategik Kerjasama Kemitraan SMK – DUDI dalam Peningkatan Mutu SMK lengkap dengan berbagai aspek yang ada dan terlibat di dalamnya.

Berdasarkan pembahasan pada masing-masing topik bahasan, didapatkan gambaran dari hasil implementasi manajemen strategik peningkatan mutu berbasis kemitraan pada SMK di Kota Yogyakarta bahwa (1) capaian untuk pelaksanaan PSG/PKL bagi siswa SMK di industri selama ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahwa seharusnya industri dapat berperan secara penuh dalam melaksanakan pelatihan dan sertifikasi pelatihan yang diarahkan ke kondisi kerja atau produksi di industri, dengan prinsip efektivitas dan efisiensi secara ketat; (2) magang bagi guru dan teknisi belum terjadwal baik waktu maupun materinya, karena direncanakan sendiri oleh sekolah tanpa melibatkan industri dalam perencanaan; (3) kuliah umum dilaksanakan sesuai kebutuhan sekolah saat awal tahun ajaran baru, belum melibatkan industri khususnya ketika terjadi inovasi dan perkembangan teknologi baru; (4) pelaksanaan uji kompetensi produktif (UKP) dilaksanakan secara tersendiri oleh sekolah belum melibatkan langsung asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi profesi; (5) validasi kurikulum dilaksanakan oleh sekolah dengan memperoleh masukan, namun tidak melibatkan industri dalam proses selanjutnya; (6) pengembangan sumber belajar belum dapat dikembangkan secara optimal oleh hampir semua sekolah, hanya sekolah yang telah melakukan ikatan secara kuat yang memperoleh dukungan pengembangan sumber belajar; (7) pengembangan unit produksi dan jasa (UPJ) belum dapat dikembangkan secara optimal karena industri tidak terlibat langsung dalam semua proses; (8) penyelenggaraan kelas khusus industri belum dapat dilaksanakan oleh hampir semua sekolah, hanya satu sekolah yang telah melaksanakan; (9) rekrutmen calon karyawan belum dapat optimal, karena minimnya sosialisasi dan promosi potensi sekolah kepada industri.

Hasil penelitian tentang implementasi program peningkatan mutu SMK berbasis kerjasama kemitraan ini merupakan “Kondisi saat sekarang”, yang dikaji melalui pendekatan analisa SWOT dan *ethic – emic* dalam rangka memahami kekuatan (S),

kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), dalam rangka menentukan isu strategis yang menjadi dasar konsep pengembangan alternatif model kerjasama kemitraan antara SMK dengan dunia kerja, sebagai “Kondisi yang diharapkan”.

Pengembangan model konseptual peningkatan mutu SMK berbasis kerjasama kemitraan SMK dengan mengimplementasikan manajemen strategik dalam penyusunan rencana strategik, program kerja dan kegiatan pengembangan sekolah secara menyeluruh untuk mencapai tujuan dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak. Berupa pengembangan model konseptual dalam membangun visi dengan melibatkan stakeholder SMK secara lebih aktif dalam pengembangan SMK, mengingat lulusan dari SMK diharapkan mampu memenuhi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri atau dunia kerja.

Pengembangan model peningkatan mutu pendidikan kejuruan berbasis kemitraan didasarkan pada pendekatan pengelolaan pendidikan yang bertitiktolak dari pemikiran pertimbangan, kebutuhan dan harapan dunia kerja, maksudnya bahwa sekolah bertopaang pada kondisi nyata kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia kerja, bukan semata-mata mengikuti petunjuk pemerintah, dengan kata lain sekolah akan melaksanakan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan dunia kerja. Sehingga peran dan partisipasi masyarakat dan dunia kerja sangat dibutuhkan selama proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

Pada model tersebut kekuatan kemitraan antara sekolah (SMK) dengan dunia kerja terletak pada kemampuan mereka mensinergikan diri dalam menjawab semua tantangan dan isu-isu yang berkembang, sehingga mampu diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang menjadi buah karya bersama antara sekolah dengan industri, sehingga muncul partisipasi dan tanggungjawab dunia usaha untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Implementasi manajemen strategik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan proses kegiatan strategis dalam rangka menciptakan masa depan sekolah yang lebih baik yang dilakukan melalui : (1) kaji integrasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan

(*weakness*), lingkungan internal, serta kaji peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) lingkungan eksternal; (2) formulasi strategi, yaitu dengan adanya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan; (3) implementasi strategi, yaitu dengan adanya program, anggaran dan prosedur kerja; (4) penilaian dan pengendalian, yaitu proses pemantauan dan mengarahkan kegiatan supaya sesuai dengan yang direncanakan.

Pencapaian tujuan sekolah memerlukan alat yang berperan sebagai akselerator dan dinamisator sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, strategi diyakini sebagai alat untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi sekolah dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah bagaimana memaksimalkan peran stakeholder dalam turut menyukseskan program dan tujuan program sekolah melalui peran aktif.

Strategi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan rencana komprehensif bagaimana suatu sekolah dapat mencapai visi secara unggul kompetitif di tengah perubahan lingkungan secara cepat, kompleks dan dinamis. Kekuatan (*strength*) harus mampu dikembangkan dan kelemahan (*weakness*) harus mampu dieliminir, sehingga mampu menjadi sebuah power dan energi yang cukup kuat dalam membangun visi sekolah dan menggerakkan semua komponen sekolah menuju tujuan yang telah dicita-citakan. Sementara itu sekolah harus mampu membaca peluang (*opportunity*) dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan dalam menggerakkan organisasi serta mampu menghindari setiap ancaman (*threat*) khususnya persaingan agar tetap dapat eksis dan berkembang dengan baik.

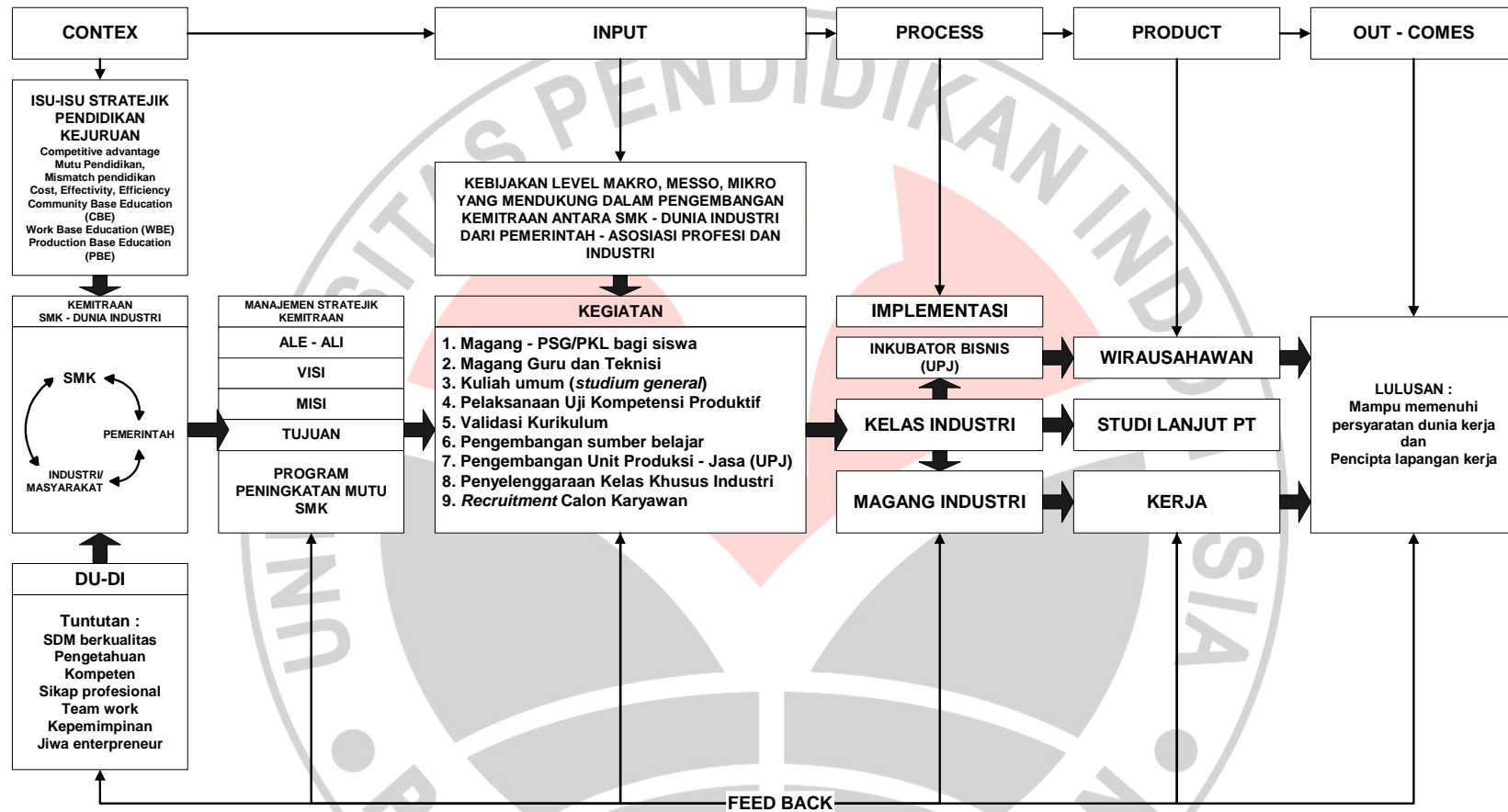
Visi SMK harus dibangun sebagai wujud kepedulian terhadap nilai prestasi, keunggulan, karya kreatif dan inovatif, karir; dan kebersamaan. Depdiknas (2005 : 1) memberikan rambu-rambu visi sekolah yaitu : (1) memiliki indikator keunggulan prestasi akademik dan non akademik; (2) berkepribadian, nasionalisme, budaya nasional; (3)

perkembangan era global; (4) perkembangan IPTEK; (5) dilandasi keimanan dan ketaqwaan.

Visi di SMK ini hendaknya dibangun dengan mengakomodasi kontribusi masyarakat sekolah khususnya dunia usaha dan dunia industri, Komite Sekolah (Orang tua) dan pemerintah (Disdik). Hal ini masih perlu terus dikembangkan, mengingat masyarakat sangat mengharapkan SMK dapat berperan sebagai pusat pengembangan tenaga kerja trampil dan terdidik yang dapat berperan dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Maka strategi alternatif untuk memperbesar peluang lulusan di SMK untuk bisa diterima oleh dunia kerja, dipandang perlu membangun kerjasama melalui partisipasi aktif dunia kerja dan dunia industri dalam membangun visi sekolah, dalam rangka menciptakan keterpaduan lulusan dengan visi atau kriteria calon tenaga kerja yang diharapkan oleh dunia kerja. Aspek strategis dalam pengembangan visi sekolah harus terus dikembangkan sehingga tidak hanya dikendalikan, akan tetapi harus mengendalikan lingkungan untuk berubah.

Bertolak dari hal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa pengembangan manajemen strategik pendidikan kejuruan perlu dilakukan dalam usaha untuk menciptakan sinkronisasi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Sehingga faktor-faktor yang menentukan mutu pendidikan kejuruan harus diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Faktor penentu tersebut diantaranya siswa, guru, kurikulum, bahan ajar, metode, media, dana, sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat. Empat tantangan utama yang harus dikelola dan diantisipasi yaitu : (1) misi berkaitan dengan apa yang harus dicapai; (2) kompetisi berhubungan dengan bagaimana sekolah dapat berkompetisi; (3) kinerja bagaimana sekolah mampu menunjukkan hasil atau manfaatnya; dan (4) perubahan berhubungan dengan bagaimana sekolah mengatasi perubahan dan tantangan yang berkembang di masyarakat.

Model pengembangan manajemen strategis SMK dalam mengembangkan visi, misi, tujuan dan target dapat digambarkan dalam sebuah model strategis sebagai berikut :



Gambar 7. Model peningkatan mutu sekolah berbasis kemitraan antara sekolah dengan dunia kerja

Pada model tersebut nampak bahwa upaya pengembangan kemitraan dilakukan sebagai sebuah usaha dalam menjawab tantangan isu-isu strategik pendidikan kejuruan dan tuntutan dunia industri – dunia kerja terhadap pendidikan kejuruan. Kemitraan antara SMK dengan dunia kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh SMK bersama dunia industri dan masyarakat serta pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan kejuruan yang membutuhkan peran serta masyarakat khususnya industri dalam pengembangan seluruh sendi penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya perbaikan sistem pendidikan perlu menetapkan 3 (tiga) agenda pokok yaitu : (1) pengembangan paradigma baru; (2) mengatasi sikap yang paradoksal terhadap pendidikan dan; (3) melaksanakan *education re-engineering*. Menurut Basuki Wibawa (2005) salah satu paradigma yang perlu dikembangkan adalah bagaimana memahami pendidikan sebagai sebuah industri mulia (*noble industry*) agar pendidikan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, selanjutnya adalah perlu mengembangkan *total transformational education* (TTE) sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang dapat menghasilkan lulusan pendidikan memiliki *IMTAQ* dan *IPTEK* serta berbudi pekerti.

Sementara sikap paradoksal yang nampak dalam pengembangan pendidikan adalah pendidikan selalu dikatakan penting dan harus diutamakan, namun demikian selalu diremehkan, hal ini disebabkan karena kebijakan pendidikan masih bersifat *political driven*. Sedangkan rekayasa ulang pendidikan dimaksudkan sebagai upaya untuk menata kembali konsep, perencanaan dan implementasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengacu pada kebutuhan pasar kerja baik lokal, nasional, regional bahkan internasional.

Pengembangan manajemen strategik peningkatan mutu SMK berbasis kemitraan dapat dibangun bersama antara SMK dengan industri dan pemerintah baik

daerah maupun pusat sebagai jawaban atas beberapa isu strategi pendidikan kejuruan yang berkembang diantaranya: (1) tuntutan terhadap *competitive advantage* produk & Jasa industri nasional; (2) tuntutan terhadap kapasitas SDM yang berkualitas; (3) tuntutan terhadap mutu pendidikan; (4) terjadinya *mismatch* pendidikan; (5) peningkatan jumlah pengangguran terdidik; (6) peningkatan *cost* dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan; (7) rendahnya *effectivity* dan *Efficiency* karena rendahnya relevansi penyelenggaraan pendidikan kejuruan; (8) Paradigma baru pendidikan kejuruan dalam pengembangan konsep-konsep *community Base Education (CBE)*, *Work Base Education (WBE)*, dan *Production Base Education (PBE)* dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Beberapa isu stratejik tersebut hendaknya dapat ditangkap oleh kedua belah pihak khususnya SMK dan industri dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi masing-masing, sehingga kedua belah pihak mampu menyelaraskan kebutuhan dan tuntutan masing-masing dalam sebuah kerjasama strategis kemitraan antara SMK dan dunia industri. Dalam mensikapi isu stratejik tersebut, SMK bersama industri dapat berkolaborasi atau setidaknya bekerjasama dalam menyusun rencana stratejik pengembangan mutu SMK yang diwujudkan dalam suatu analisis lingkungan baik internal maupun eksternal (ALI dan ALE) sehingga menghasilkan rumusan visi, misi yang dapat menjawab semua tantangan dan hambatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Berdasarkan SWOT analisis tersebut dapat dirumuskan tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan berbagai program peningkatan mutu pendidikan kejuruan.

Beberapa kegiatan dan program pengembangan yang dapat dilaksanakan bersama antara SMK dengan dunia kerja dan dunia industri diantaranya adalah :

- a. Magang - PSG/PKL bagi siswa, sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan dalam (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja; (2) meningkatkan dan memperkuat keterkaitan dan kesepadanan/kecocokan (*link and match*) antara lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan dunia kerja; (3) meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional dengan memanfaatkan sumberdaya pelatihan yang ada di dunia kerja; (4) memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan (Djojonegoro, 1999 dalam Muliati, 2008). Oleh karenanya dalam penyelenggaraannya PKL/PSG harus direncanakan bersama oleh SMK dan dunia industri khususnya dalam program pendidikan dan pelatihan bersama yang terdiri dari: (1) Standar Kompetensi/Keahlian Tamatan; (2) Standar Pendidikan dan Pelatihan (materi, waktu, pola pelaksanaan); (3) Penilaian dan Sertifikasi; (4) Kelembagaan; dan (5) Nilai Tambah dan insentif. Sehingga industri dapat berperan sejak dari proses perencanaan termasuk seleksi calon siswa magang yang mereka butuhkan, program dan kapasitasnya serta pembimbingan yang akan diberikan, hingga pada tahap evaluasi dan sertifikasi hasil magang tersebut.
- b. Magang Guru dan Teknisi, seperti halnya program yang diselenggarakan bagi siswa, guru dan teknisipun membutuhkan penyegaran dan tambahan pengetahuan khususnya dalam memperoleh gambaran dalam perkembangan teknologi yang terjadi di industri, namun tentunya program ini harus melibatkan penuh industri terkait materi, waktu, pola pelaksanaan, dimana industri harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring hasil magang agar

dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan pendidikan kejuruan selanjutnya.

- c. Kuliah umum (*studium general*) sebagai bentuk partisipasi industri dalam memberikan informasi dan meningkatkan motivasi siswa dalam memahami bidang kerja dan tuntutan kompetensi harus dilakukan oleh SMK bersama dengan industri secara bersama agar maksud dan tujuan pelaksanaan dapat tercapai secara maksimal, keterlibatan industri dan SMK dalam kegiatan ini dapat diwujudkan sejak perencanaan materi dan pola penyelenggaraan serta evaluasi hasilnya agar informasi yang disampaikan tepat pada sasaran yang diharapkan.
- d. Pelaksanaan Uji Kompetensi Produktif (UKP) bagi SMK merupakan sebuah pengakuan terhadap kompetensi yang telah dikuasai yang dibuktikan oleh sertifikat yang dapat diterima dan diakui oleh semua pihak, sehingga keterlibatan industri, lembaga asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi profesi sangat vital. SMK dapat bersama-sama menyelenggarakan kegiatan ini sejak dalam proses perencanaan program, penyelenggaraan, evaluasi dan sertifikasi serta tindak lanjut hasil sertifikasi, disamping itu yang tidak kalah penting adalah pendanaan yang perlu dipikirkan bersama.
- e. Validasi Kurikulum merupakan kegiatan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan agar kurikulum yang digunakan dalam proses belajar mengajar dapat memenuhi standar isi yang diharapkan sehingga kompetensi lulusan dapat sesuai dengan harapan dunia industri. Dalam penyusunan kurikulum industri memegang peranan strategis khususnya dalam memberikan masukan tentang materi dan standar kompetensi serta materi yang harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan industri, disamping itu pelaksanaan dan pengawasan proses pembelajaran harus dilakukan oleh industri

agar industri memperoleh kepercayaan terhadap proses dan hasil yang dibutuhkan oleh industri.

- f. Pengembangan sumber belajar sebagai bagian penting dalam pembentukan lulusan yang berkualitas dan kompeten membutuhkan dukungan dari industri bukan hanya berupa peralatan yang ada di sekolah, namun *share* sumber daya yang dimiliki oleh industri dapat menjadi alternatif pengembangan program ini, dalam program ini dibutuhkan keterbukaan dan keselarasan program antara industri dan dunia kerja sehingga efektifitas dan efisiensi program diklat yang diselenggarakan oleh SMK dapat meningkat, dengan kata lain bahwa SMK dapat mengupayakan pengelolaan pembiayaan secara lebih ekonomis dengan *cost* yang lebih kecil, tetapi mendatangkan hasil (*product*) yang tinggi. Sehingga pembiayaan yang ada dapat lebih diprioritaskan untuk pembiayaan yang secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. SMK dan industri harus dapat terbuka khususnya dalam *share* sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga keterlibatan industri dalam kegiatan ini dapat lebih maksimal. Agar industri dapat berperan lebih maksimal, maka industri harus terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil program.
- g. Pengembangan Unit Produksi - Jasa (UPJ) sebagai bagian dalam implementasi konsep *Work Base Education (WBE)*, dan *Production Base Education (PBE)* dapat memberikan manfaat baik dari sisi finansial maupun sisi lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam pengembangan proses belajar dan peningkatan *image* produk bagi industri yang bersangkutan. Dalam pengembangan kerangka konsep *Work Base Education (WBE)*, dan *Production Base Education (PBE)* industri dapat terlibat secara penuh khususnya dalam

pengembangan unit produksi, sementara SMK dapat harus mampu memberikan otonomi dalam pelaksanaan dan pengembangan program

- h. Penyelenggaraan Kelas Khusus Industri, sebagai sebuah terobosan inovasi pendidikan kejuruan yang memadukan kebutuhan industri dan kemampuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, maka industri dapat menyelenggarakan pendidikan calon karyawan di SMK secara eksklusif sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang dibutuhkan industri. Dalam penyelenggaraannya industri bersama SMK dapat terlibat dalam proses perencanaan, seleksi, pembiayaan, proses belajar, evaluasi dan sertifikasi, monitoring dan tindak lanjut penggunaan lulusan. Muatan-muatan khusus yang dibutuhkan oleh industri dapat diintegrasikan kedalam mata pelajaran produktif atau adaptif yang ada pada struktur kurikulum SMK, sehingga *performance* dan standar lulusan dapat sesuai dengan harapan industri yang dapat langsung dimanfaatkan oleh industri yang bersangkutan.
- i. *Recruitment* Calon Karyawan merupakan bentuk kegiatan dan tanggungjawab SMK dalam menyalurkan lulusan sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki, SMK perlu memberikan keleluasaan industri dalam melakukan perencanaan dan seleksi sesuai kebutuhan tanpa melakukan intervensi yang dapat merugikan industri dalam memilih calon karyawan sesuai dengan kebutuhan mereka. SMK perlu melakukan pendekatan kepada industri dalam perencanaan kebutuhan karyawan dan menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki.

Semua kegiatan ini harus mampu dilaksanakan dan diimplementasikan baik di SMK maupun di industri secara terbuka dan bertanggungjawab dalam kerangka kerjasama kemitraan tentunya dengan dukungan kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan SMK maupun industri, dengan selalu mengedepankan komitmen dan

kepercayaan bahwa program peningkatan mutu ini sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga segala kebijakan dan pembiayaan yang ditimbulkan dalam program ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kelembagaan secara menyeluruh. Selama program berjalan baik SMK maupun industri harus selalu mengembangkan komunikasi secara intensif dalam melihat setiap isu, peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing pihak untuk segera dapat dilakukan *improvement*, sehingga sinergi dunia industri dan SMK dalam menghasilkan tenaga kerja berkualitas dapat terwujud .

C. Strategi Implementasi Model

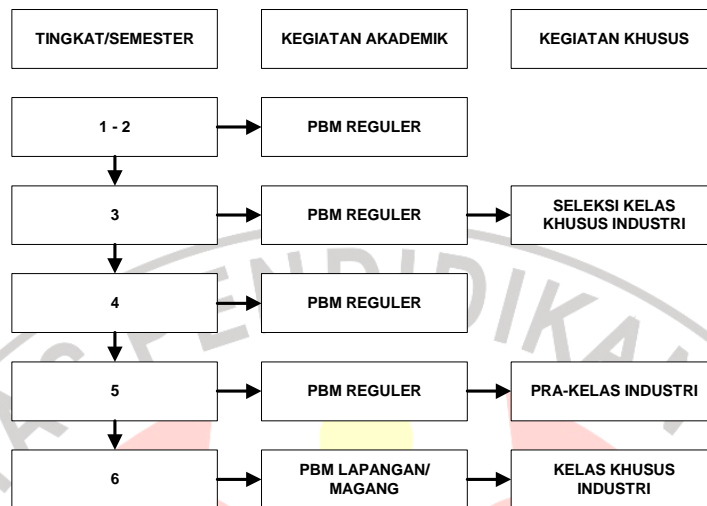
Implementasi dari program peningkatan mutu SMK berbasis kemitraan dengan DUDI dapat dilakukan dengan tiga strategi kegiatan yaitu penyelenggaraan kelas industri pada SMK yang bersangkutan, sebagaimana telah dilaksanakan oleh SMK Piri 1 bersama dengan PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia, magang industri dan inkubator bisnis dalam bentuk unit produksi dan jasa (UPJ). Dalam strategi implementasi tersebut maka akan tercipta suatu model penyelenggaraan pendidikan dengan pola *multi disciplinary campus* yang merupakan sebuah pola pendidikan dan latihan untuk meningkatkan mutu lulusan SMK yang bermutu, disiplin dan mandiri melalui empat pusat pendidikan yaitu sekolah (SMK), dunia usaha – dunia industri, rumah tempat tinggal siswa dan unit produksi dan jasa yang dimiliki oleh sekolah.

Penyelenggaraan kelas khusus industri sebagaimana telah dilaksanakan pada SMK Piri 1 Yogyakarta, adalah sebuah bentuk program kemitraan antara SMK dengan dunia usaha – dunia industri yang dapat memberikan dampak cukup besar serta manfaat yang sangat tinggi bagi semua pihak, baik SMK dengan industri maupun siswa yang mengikuti program tersebut. Dalam penyelenggaraan kelas

khusus industri yang dilaksanakan di SMK dapat dikembangkan dengan beberapa model penyelenggaraan diantaranya 4 : 2, yaitu penyelenggaraan pendidikan 4 (empat) semester dilaksanakan di sekolah dan 2 (dua) semester selanjutnya dilaksanakan magang di industri, atau juga dapat dilaksanakan 1 : 1, yaitu penyelenggaraan 1 (satu) semester di sekolah, selanjutnya 1 (satu) semester di industri begitu seterusnya bergiliran hingga 6 (enam) semester. Penyelenggaraan magang dapat dilaksanakan pada industri maupun pada unit produksi dan jasa (UPJ) yang telah ada pada SMK yang diselenggarakan bersama antara SMK dengan industri yang bersangkutan.

Kurikulum yang digunakan dalam program kelas khusus industri ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi (*competecy based curriculum*) yaitu semua kegiatan kurikulum diorganisasi ke arah fungsi atau kemampuan yang dituntut pasaran kerja atau dibidang pekerjaan sesuai dengan harapan dan tuntutan serta standar dari industri pasangan. Sehingga setiap siswa akan mencapai kompetensi yang disesuaikan dengan capaian keterampilan guna memenuhi standar spesifikasi industri. Oleh karenanya peran serta industri dalam program ini akan sangat dominan khususnya dalam memenuhi kebutuhan baik sarana dan prasarana pembelajaran juga tenaga pengajar (instruktur) yang sesuai dengan standar dan spesifikasi industri.

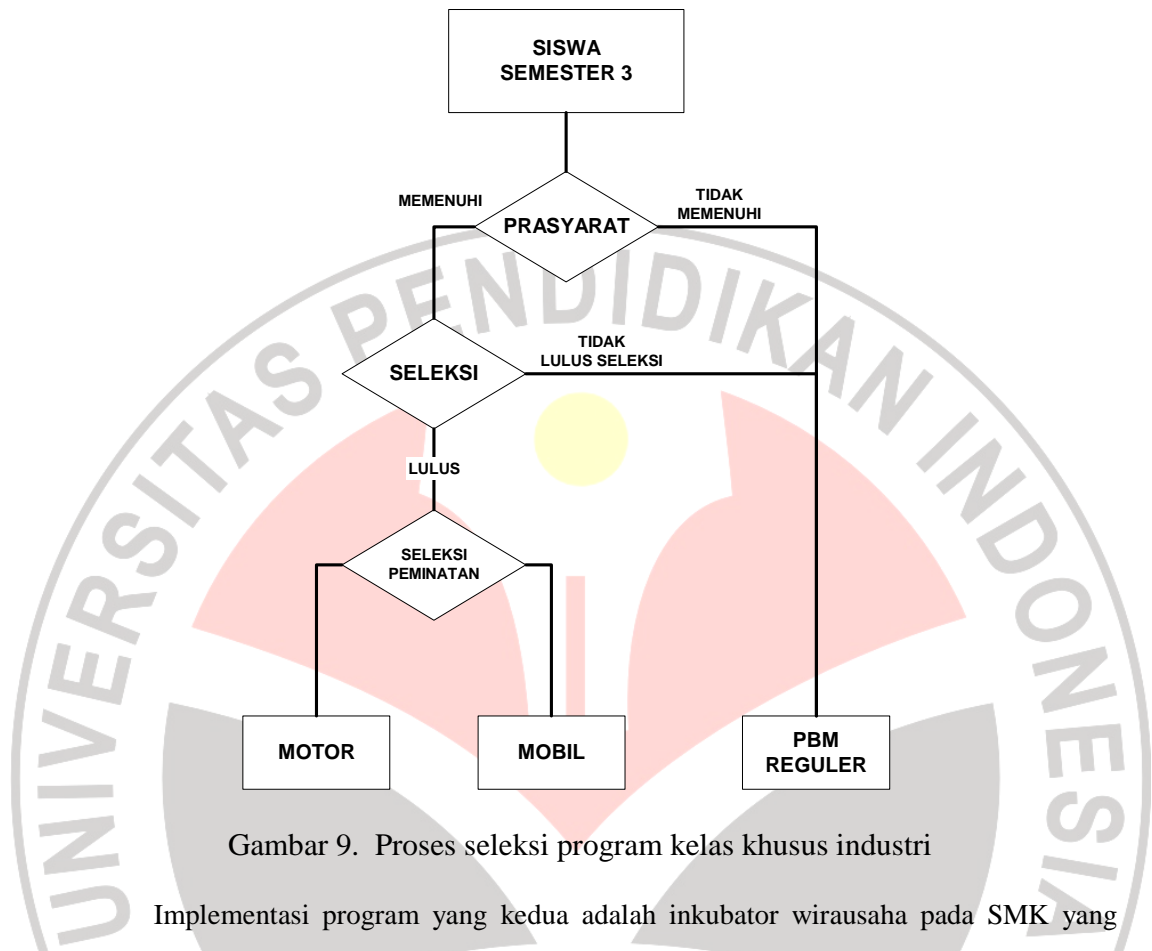
Pola penyelenggaraan kelas khusus industri dalam penyelenggaraan PBM yang dilaksanakan pada dunia industri dilaksanakan pada Semester VI, sebagai tahap akhir siswa dalam menyelesaikan studi. Pada semester tersebut diharapkan siswa dapat menyelesaikan beberapa mata pelajaran lanjut yang bersentuhan langsung dengan obyek nyata di dunia kerja. Skema penjenjangan pendidikan dapat digambarkan pada bagan dibawah ini:



Gambar 8. Pola penyelenggaraan kelas khusus industri

Selain penyelenggaraan dan PBM, yang tidak kalah pentingnya adalah pola *recruitment* untuk mendapatkan siswa yang memiliki minat serta kemampuan dalam menyelesaikan program dengan baik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan aspek *recruitment* yang memegang peranan penting terutama dalam rangka menyeleksi calon siswa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup untuk dikembangkan di industri. Seperti tampak pada bagan di bawah seleksi dilakukan pada semester III, materi seleksi meliputi potensi akademis yang dapat diketahui dari besarnya pencapaian nilai akademik melalui raport. Dalam *recruitment* perlu dilakukan persyaratan minimum nilai rata-rata raport yang dapat mengikuti proses seleksi.

Selanjutnya dilakukan seleksi potensi akademis berupa tes tulis dengan materi pengetahuan dasar dan bahasa inggris. Bagi siswa yang lulus seleksi dapat melakukan tahapan selanjutnya berupa persetujuan dari orang tua wali dan kesanggupan mengikuti pendidikan selanjutnya. Bagi siswa yang tidak lulus seleksi selanjutnya dapat mengikuti perkuliahan reguler seperti biasanya.



Gambar 9. Proses seleksi program kelas khusus industri

Implementasi program yang kedua adalah inkubator wirausaha pada SMK yang biasanya disebut sebagai unit produksi dan jasa (UPJ) yang diselenggarakan oleh SMK dengan dukungan dari industri memberikan dampak yang sangat besar dalam membekali siswa SMK mengenal dunia usaha dan wirausaha. UPJ pada SMK merupakan suatu unit usaha (bisnis) yang diselenggarakan oleh SMK dalam mengaplikasikan semua ketrampilan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh SMK untuk mendapatkan pemasukan (*income generating*) yang memberikan manfaat dalam pengembangan sekolah dan kesejahteraan semua komponen sekolah. Penyelenggaraan UPJ merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh sekolah dalam menghasilkan produk berupa barang atau melayani jasa kepada pelanggan, seperti tertuang dalam PP No. 29/1990 tentang pendidikan menengah kejuruan

yang secara tegas menyebutkan bahwa untuk mempersiapkan siswa SMK sebagai tenaga kerja, maka SMK dapat mendirikan UPJ yang beroperasi secara profesional.

Dalam pengorganisasian UPJ pada SMK harus berada dibawah kewenangan kaprodi agar dapat dikembangkan sepenuhnya untuk pengembangan proses pembelajaran, (sementara yang terjadi selama ini berada di bawah koperasi sekolah) dan pelaksanaannya dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran praktek kejuruan. Melalui mata pelajaran praktek kejuruan akan dihasilkan barang atau layanan jasa yang diarahkan pada produk yang berorientasi pasar. Dengan demikian UPJ merupakan lingkungan belajar yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan penekanan pada kemampaun dimensi kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya UPJ dapat berperan sebagai inkubator wirausaha yang diselenggarakan secara integratif dengan pembelajaran merupakan sebuah metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan *soft skills* siswa terutama mengembangkan jiwa wirausaha mereka dengan memberikan pengetahuan praktis lebih banyak dibandingkan teori yang diselenggarakan di kelas.

Pada dasarnya pengembangan model pembelajaran inkubator pada unit jasa produksi (UPJ) bertujuan memberikan pengalaman nyata pada siswa tentang bagaimana membuat suatu usaha dan mengelola usaha tersebut. Sehingga dalam proses pembelajaran yang dilakukan pada UPJ selain diberikan pengalaman tentang teknik jasa perbaikan dan produksi, juga diberikan tentang pelayanan pelanggan dan pengelolaan usaha baik pengelolaan sumber-sumber daya yang ada, keuangan dan pengelolaan pelanggan. Sehingga diharapkan dari UPJ dapat dibentuk lulusan yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan mampu menciptakan usaha sendiri sebagai *job creator* dan mengembangkan usaha tersebut.

Selama program dilaksanakan sekolah dapat meminta pendampingan berupa pendampingan teknis, bantuan peralatan, suku cadang dan bantuan pengelolaan serta pemasaran produk dan jasa yang dilakukan oleh mitra usaha yaitu perusahaan sejenis, sehingga dari proses pendampingan tersebut diharapkan unit produksi dan jasa dapat

berkembang. Disamping pendampingan yang dilakukan terhadap UPJ sekolah, mitra usaha juga dapat memberikan pendampingan kepada lulusan SMK yang membuka usaha baru, sebagaimana pendampingan yang dilakukan kepada UPJ, sehingga usaha baru yang dikembangkan oleh lulusan SMK dapat tetap eksis dan berkembang.

Model pengembangan yang dilakukan bersama UPJ dan lulusan dapat berupa *multi level marketing* (MLM) maupun model *franchise* sebagai suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan, dimana pemilik merek (*franchisor*) memberikan hak kepada individu atau unit usaha untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu, yang menjadikan mitra usaha sebagai bagian dari sistem distribusi yang mereka miliki. Sehingga SMK dapat berfungsi sebagai pencetak wirausahawan handal.

Kegiatan selanjutnya yang dapat diimplementasikan dalam upaya meningkatkan mutu SMK berbasis kemitraan dengan dunia usaha adalah magang industri yang diselenggarakan pada industri pasangan yang berlangsung selama waktu yang telah disepakati bersama dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa terhadap bidang kerja yang akan dihadapi setelah siswa lulus dari SMK. Kegiatan magang industri dilakukan sebagai upaya untuk memadukan program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Kegiatan dalam kerja magang ini secara langsung diarahkan pada bidang kerja yang lebih ditekankan pada kegiatan bekerja sambil belajar (*learning by doing*) secara langsung pada keadaan yang nyata.

Program magang yang dilaksanakan di industri pasangan dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap pengenalan (*orientasi*) industri, dimana pada tahap ini sebuah industri pasangan memberikan training khususnya yang dilaksanakan oleh training section pada industri yang bersangkutan, pemberian penjelasan dalam bentuk training pendahuluan ini sangat berguna sebagai pengenalan awal tentang sistem dan cara kerja pada dunia industri, program ini dapat dilakukan dalam waktu 2 – 3 hari. Selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan pada bidang

produksi atau jasa sebagai inti dari kegiatan ini dengan bimbingan atau supervisi dari industri bersama dengan guru pembimbing dari SMK, pelaksanaannya dapat dilaksanakan selama kurun waktu yang telah disepakati bersama antara SMK dengan industri pasangannya. Tahap terakhir dari program ini adalah tahap refleksi dan evaluasi terhadap siswa yang dilakukan bersama antara pembimbing industri (*supervisor*) dan guru pembimbing, dengan mengevaluasi tingkat kecakapan siswa selama mengikuti program magang sehingga akan memudahkan sekolah dalam pengisian raport dan pemberian sertifikat bagi siswa yang telah selesai mengikuti magang.

Pada akhirnya hasil dari implementasi program kegiatan ini adalah lulusan yang diharapkan mampu menjadi *job creator* dan menciptakan lapangan baru serta membantu lainnya dalam memperoleh kesempatan kerja, juga karena program yang dilaksanakan mengacu kepada kebutuhan dunia kerja, maka lulusannya akan lebih siap dengan lingkungan kerja yang akan dihadapi selanjutnya. Selain dua kesempatan tersebut, kesempatan lainnyapun memberikan peluang kepada lulusan untuk dapat mengikuti studi lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik universitas, politeknik, atau akademi melalui proses belajar mengajar yang lebih intensif dalam mempersiapkan siswa menghadapi ujian masuk perguruan tinggi dan membekali siswa dalam menghadapi studi lanjut yang lebih tinggi.

Jika proses dan semua kegiatan dapat berjalan lancar, maka selain hasil seperti tersebut di atas, maka dampak dari implementasi model pengembangan mutu SMK berbasis kemitraan dengan industri adalah terciptanya tenaga kerja yang kompeten, yang memiliki kemandirian dan semangat berwirausaha, sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih baik yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.